AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865

Vol. 10 No. 1 Bulan Mei Tahun 2025

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index

Jurnalfisipuniska@gmail.com

DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JRAGUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DUSUN KEDUNGGLATIK

Hairun Nisyak[1)*], Gunawan[2)]

[1)* 2)] Departemen Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Negeri Semarang
Email: hairunnissa1010@students.unnes.ac.id
*Corresponding Author**

DOI :
10.31602/as.v10i1.18397
Riwayat Artikel
Diterima : 20-02-2025
Disetujui : 06-05-2025
Diterbitkan : 31-05-2025
Hal : 32 - 39

Abstract

In the process of dam development, vulnerabilities often arise that have a direct impact on the community around the project area. This study aims to determine the impact of land conversion on the social and economic life of the Kedungglatik Hamlet community after the start of the Jragung Dam construction process. This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out using observation techniques and in-depth interviews. The results of the study showed a direct impact on social and economic life that was detrimental to the community. This impact was caused by the unclear compensation and uncertainty of relocation of residents' land that was converted into a dam project. Loss of livelihoods because agricultural land has decreased drastically and the Jragung River as a source of agricultural water has been devoured by the reclamation process. The implication of this study is the importance of inclusive development planning and must be balanced with real efforts to mitigate negative impacts, ensure the welfare of affected communities, and maintain the balance of the existing ecosystem.

Keywords: *Dam development, Jragung Dam, Land conversion, Unclear compensation*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2025 by Journal As Siyasah

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan. Pembangunan, sebagaimana didefinisikan oleh (Jemadu, 2003) dan (Rath, 2019), merupakan segala bentuk usaha baik oleh aktor negara maupun non-negara sebagai proses transformasi ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada faktor-faktor budaya dan lingkungan yang kompleks serta interaksinya. Sementara Singh dalam (Rath) 2019, mendefinisikan bahwa pembangunan adalah suatu strategi perubahan yang terencana dan dianggap diinginkan oleh anggota masyarakat. Dalam prosesnya, pembangunan menjadi katalis perubahan, transformasi bertahap yang seringkali penuh tantangan. Pembangunan memerlukan proses yang panjang dan berlapis yang di dalamnya terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus risiko berpotensi merugikan. Mulai dari proses hingga sampai terwujudnya tujuan suatu pembangunan semestinya melewati berbagai prosedur yang mewujudkan sedikit demi sedikit perubahan. Dalam proses tersebut dapat memunculkan dinamika akibat pembangunan yang menimbulkan tantangan

baru bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung. Perubahan-perubahan yang silih berdatangan dapat menimbulkan permasalahan yang tanpa disadari menjadi tahap terselubung dalam pembangunan akibat dari kusutnya tahap-tahap yang dilalui sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari sifat pembangunan itu sendiri yang berorientasi pada perubahan struktural besar, yang dapat menggusur atau mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan pembangunan.

Salah satu bentuk pembangunan strategis nasional yang penting adalah pembangunan infrastruktur bendungan. Saat ini masyarakat telah dihadapkan pada realita bahwa ketersediaan sumber daya air sangat kritis, maka keberadaan bendungan dengan tampungannya yang besar dapat mengurangi tingkat kekritisan air (Mulyono, 2017). Ketersediaan air sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara. Kebutuhan air untuk domestik dan non-domestik di Indonesia diperkirakan mencapai 2,44 milliar m^3 pada tahun 2040 (Larasati et al., 2021). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program strategis, telah menunjukkan komitmen besar dalam pembangunan bendungan. Dimuat dalam *Kompas.com* (Fadli & Alexander, 2022), menyebutkan pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan 61 bendungan hingga akhir periode tahun 2024, dimana hingga pada tahun 2021 telah 29 bendungan selesai dibangun dan 32 sisanya masih dalam proses konstruksi. Program pembangunan tersebut dilaksanakan dengan tujuan resmi dalam rangka mendukung ketahanan air yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Namun, dibalik berbagai proyek tersebut, masih terdapat tantangan yang kompleks, terutama dampaknya terhadap kelompok masyarakat kawasan pembangunan. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan seringkali menghadapi risiko pembangunan. Sebagaimana dikutip dari Dye (2016), dengan lekatnya paradigma bendungan yang diimajikan sebagai simbol modernitas dan kunci pembangunan ekonomi nasional, perencanaan serta praktik konstruksi telah memungkinkan banyak masyarakat setempat memperoleh potensi negatifnya. Hal ini seringkali menciptakan kesenjangan antara visi pembangunan yang diusung oleh pemerintah dan realitas dampak sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat terdampak langsung. Dalam setiap pembangunan bendungan, membutuhkan tahap pengadaan tanah. Dalam Muliawan (2018), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sayangnya, seringkali pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan justru mengakibatkan masyarakat menjadi korban dari dampak pengadaan tanah (Muliawan, 2018). Manajemen pengadaan tanah yang tidak beres sangat rentan pada segi lingkungan fisik yang mengguncang berbagai kondisi kelangsungan hidup masyarakat setempat akibat perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, telah menyebabkan berbagai permasalahan yang serius di bidang lingkungan termasuk degradasi lingkungan secara keseluruhan yang berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi penduduk setempat, sementara warga Desa Wadas terus bersikeras menentang segala tindakan yang merusak lingkungan dan mendesak untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam mengatasi permasalahan ini (Ramadhan et al., 2024). Selain itu, penelitian oleh (Prayogo et al., 2024), pembangunan Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar bendungan khususnya dilihat dari pola usaha setelah hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Alih fungsi lahan dalam pembangunan bendungan seringkali dalam pelaksanaannya justru meminggirkan kelompok rentan, terutama pada masyarakat petani yang kehilangan akses terhadap lahannya. Problematika semacam ini semakin krusial ketika proyek pembangunan telah memengaruhi area yang merupakan sumber utama pendapatan bagi masyarakat pertanian. Hal itu sejalan dengan temuan Andri (2016), pembangunan bendungan telah mengakibatkan perubahan lahan sawah menjadi perairan, berkurangnya lahan

sawah, dan berubahnya teknologi yang digunakan untuk mendukung pembagian kerja anggota keluarga. Sementara dalam penelitian (Sitepu et al., 2022), tantangan lain yang dihadapi dalam masa pembangunan bendungan adalah kendala dalam ganti rugi atau sengketa pengadaan lahan. Sebuah penelitian lain dari (Salinas et al., 2019) mengungkap terdapat Bendungan Castanhão yang merupakan proyek mega manajemen air di Brasil yang bertujuan untuk mengurangi kelangkaan air dan meningkatkan ekonomi telah memaksa lebih dari 10.000 orang mengungsi, kemudian setelah pemukiman kembali, tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar hidup baru mereka menunjukkan hasil yang sedikit negatif karena adanya kesenjangan antara ekspektasi yang dibangun sebelum konstruksi dengan realitas yang dihadapi pasca pembangunan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bendungan tidak dapat dilepaskan dari berbagai dampak yang ditimbulkan. Demikian halnya dengan proses pembangunan Bendungan Jragung di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sebuah dusun dengan predikat terisolasi yang dimana kawasannya menjadi bagian dari lokasi proyek pembangunan Bendungan Jragung. Bendungan Jragung dibangun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan irigasi, pengendalian banjir, dan pasokan air baku bagi masyarakat sekitar. Namun, dengan mayoritas masyarakat di Dusun Kedungglatik yang bermata pencaharian sebagai petani, proses pembangunan bendungan telah mengusik ruang hidup masyarakat. Hal itu menimbulkan beraneka dinamika bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketidakpastian atas nasibnya juga mendorong masyarakat untuk melakukan aksi protes guna menuntut kejelasan nasibnya mengenai kompensasi atau ganti untung tanah yang dialihfungsikan untuk pembangunan Bendungan Jragung di tanah kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat Dusun Kedungglatik juga menuntut kejelasan wacana relokasi tempat tinggal karena pembangunan yang terus berlanjut terus mempengaruhi kondisi perekonomian hingga kesehatan udara di lingkungan hidupnya.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari proses pembangunan Bendungan Jragung terhadap masyarakat Dusun Kedungglatik. Penelitian ini tidak hanya melihat dampak negatifnya tetapi juga memaparkan dinamika yang lebih luas, termasuk bagaimana masyarakat menghadapi perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa Dusun Kedungglatik dan dua warga dusun tersebut, salah satunya merupakan seorang pemuda usia produktif kerja. Kepala desa dipilih sebagai informan untuk memberikan gambaran tentang kondisi umum desa, kebijakan terkait pembangunan bendungan, serta dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, wawancara dengan warga, termasuk pemuda, dilakukan untuk memahami secara mendalam pengalaman langsung masyarakat terkait dampak sosial dan ekonomi akibat pembangunan bendungan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung di Dusun Kedungglatik, untuk menangkap dinamika langsung di dalam kawasan tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada informan (Wahyuningtiyas et al., 2024). Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data secara deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data secara detail berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi, serta penyimpulan dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dusun Lokasi Calon Bendungan Raksasa

Dusun Kedungglatik yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, memiliki karakteristik wilayah yang terpencil. Dusun

ini berjarak sekitar 4 km dari pusat pelayanan Desa Candirejo, tetapi akses menuju lokasi tersebut masih sangat terbatas. Kondisi jalan yang tidak mulus, ditambah tantangan saat musim hujan yang membuat jalur sulit dilalui kendaraan. Selama puluhan tahun, warga Dusun Kedungglatik menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan. Upaya untuk menjadi dusun yang lebih maju terhambat oleh kurangnya perhatian dan dukungan dari pihak terkait. Minimnya infrastruktur dasar seperti akses transportasi yang memadai dan kurangnya perhatian dari pihak. Masyarakat Dusun Kedungglatik terhambat dalam menciptakan perubahan yang signifikan, karena kurangnya dukungan dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan mereka.

Dusun Kedungglatik terdiri atas tiga RT dalam satu RW, dengan jumlah penduduk yang dihuni oleh 110 kepala keluarga (KK). Wilayah ini memiliki 90 rumah tempat tinggal dan satu masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Sebagian besar lahan di sekitar pemukiman warga dimanfaatkan untuk pertanian, yang merupakan sektor perekonomian masyarakat setempat. Mayoritas hasil pertanian warga adalah jagung, yang menjadi komoditas utama dusun ini. Hasil panen jagung biasanya disimpan di gubug-gubug sederhana yang berada di depan rumah warga (Gambar 1). Kehidupan sehari-hari warga sangat terikat pada siklus hidup, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan ketersediaan lahan yang produktif.

Gambar 1. Gubug Jagung



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Warga Dusun Kedungglatik dengan kondisi geografis yang aksebilitasnya terbatas, warga dihadapkan pada tantangan logistik untuk mengangkut material jika membangun rumah berdinding tembok. Oleh karena itu rata-rata rumah warga terbuat dari kayu. Minimnya akses terhadap material bangunan yang kokoh membuat warga bergantung pada struktur kayu. Rumah kayu juga untuk memudahkan warga jika sewaktu-waktu dipindahkan saat musim penghujan tiba. Setiap rumah selalu diberikan tumpukan batu kali kecil sebagai penopang. Kepala Dusun Kedungglatik Taswanto mengungkapkan, jarak rumah warga yang terlalu dekat dengan sungai membuat warga kerap merasa mencekam setiap kali hujan deras. Seperti kutipan wawancara berikut:

Setiap tahun terdapat dua atau tiga rumah yang terancam kena banjir Sungai Jragung. Saat ini ada tiga rumah yang terancam dan harus dipindahkan. Sebelumnya ada 100 rumah kayu di dusun ini, sepuluh rumah lainnya terendam hingga hanyut ketika musim penghujan. (Sumber wawancara: Pak Taswanto)

Dusun ini tidak hanya menghadapi keterbatasan dalam akses infrastruktur, tetapi juga dalam hal akses ke fasilitas dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan potensi pertanian yang ada, sebenarnya terdapat peluang untuk mengembangkan dusun ini menjadi lebih sejahtera, asalkan terdapat intervensi program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dusun Kedungglatik memberikan gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat pedesaan di wilayah terpencil masih bergulat dengan keterbatasan akses dan pembangunan. Kondisi ini menjadi pengingat bagi berbagai pihak untuk lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil seperti Dusun Kedungglatik, agar pembangunan tidak hanya mencakup wilayah-wilayah yang lebih maju, tetapi juga menjangkau mereka yang berada di pinggiran.

2. Pembangunan Bendungan Jragung

Proyek pembangunan Bendungan Jragung sejatinya bukanlah hal baru. Rencana awal pembangunan bendungan ini telah diprogramkan pada periode 1970-1976. Namun, proyek tersebut gagal terealisasi dan dialihkan ke wilayah Kedungombo. Barulah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pada tahun 2020,

rencana pembangunan Bendungan Jragung kembali dihidupkan. Pelaksana proyek ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Bendungan Jragung dirancang dengan kapasitas tampung 90 juta meter kubik dan luas genangan 503,1 hektar. Sumber air utama bendungan berasal dari Sungai Jragung yang memiliki luas Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 94 kilometer persegi. Bendungan ini didesain dengan tipe urugan zonal inti tegak dengan elevasi puncak bendungan 119,5 meter dan lebar puncak bendungan 10 meter. Pembangunan bendungan ini diharapkan mampu menyuplai kebutuhan air baku bagi lahan seluas 4.528 hektar untuk masyarakat Semarang, Demak, dan Grobogan, mengairi irigasi lahan pertanian, mengendalikan banjir di hilir Sungai Jragung serta dengan potensi menyuplai listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro kapasitas 1400 kw. Selain itu, bendungan ini juga diharapkan memiliki nilai tambah dalam pengembangan destinasi wisata air dan agrowisata. Kini sejak dimulainya pembangunan Bendungan Jragung, sepanjang sungai sebagian besar telah ditelan proses reklamasi. Tampak sudah cukup luas bagian hutan kawasan yang sudah digunduli hingga reklamasi Sungai Jragung di Dusun Kedungglatik (Gambar 2).

Gambar 2. Sungai Jragung yang Direklamasi



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dengan demikian, pembangunan Bendungan Jragung tidak hanya diproyeksikan sebagai solusi infrastruktur, tetapi juga sebagai peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis pariwisata di masa depan. Namun, di balik manfaat besar yang diharapkan, perubahan kondisi lingkungan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Hilangnya sebagian besar wilayah Sungai Jragung akibat reklamasi tidak hanya mempengaruhi ekosistem lokal, tetapi juga berdampak pada sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada aliran sungai dan lahan pertanian di sekitarnya. Dusun Kedungglatik, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, menghadapi ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka. Warga Dusun Kedungglatik menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan yang tidak dapat mereka hindari. Konflik ketidakjelasan ganti rugi terkait pengadaan tanah, disertai protes dari masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pembangunan ini. Bendungan Jragung adalah cerminan bagaimana proyek infrastruktur besar mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan di wilayah terdampak.

3. Lahan Hilang, Masyarakat Bimbang

Proses pembangunan Bendungan Jragung menyisakan masalah sosial pada warga Dusun Kedungglatik. Salah satu yang krusial adalah hingga saat ini banyak warga merasa bingung dan tidak puas karena kehilangan lahan tanpa kompensasi yang memadai atau kepastian yang jelas. Ketidakjelasan terkait ganti rugi atau "ganti untung" yang dijanjikan oleh pemerintah mengakibatkan hilangnya ruang hidup warga. Proses pembebasan lahan, yang seharusnya dilakukan dengan transparansi dan keadilan, justru memunculkan ketegangan sosial. Warga kehilangan lahan pertanian sebagai sumber utama penghidupan, sementara rencana relokasi pun tidak kunjung mendapat kepastian. Hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu resistensi warga terhadap pembangunan bendungan ini dengan melakukan aksi protes dan menutup jalan menuju area proyek bendungan. Seperti kutipan wawancara berikut:

Sampai saat ini pun warga belum mengetahui tentang program pembangunan bendungan akan direlokasi atau mau diapakan jenis apanya itu belum tahu. Saya bersama warga, Nduk. Terkait program terkait itu belum tahu. Maka dari itu warga

berorasi bahkan menutup jalan segala macam karena ingin penjelasan kepada pemerintah terkait bendungan ini. Minta kepastian mau diapakan warga Kedungglatik yang bahkan hanya sedikit, kenapa kok tidak bareng-bareng dalam proses ganti untung. Sampai sekarang belum tau mau direlokasi di mana, ditempatkan di mana, programnya seperti apa. Padahal proyek sudah berjalan lebih dari satu tahun. (Sumber wawancara: Pak Taswanto)

Warga awalnya mendukung proyek karena dijanjikan "ganti untung" dan relokasi yang layak. Dalam forum pertama sosialisasi, warga menunjukkan sikap menerima dan pembangunan terus berlanjut. Namun, pelaksanaan yang tidak sesuai ekspektasi menciptakan kekecewaan yang berkembang menjadi konflik. Keberagaman respons warga terhadap upaya pembebasan lahan juga menunjukkan bahwa tidak semua pihak siap menghadapi perubahan besar seperti ini tanpa bimbingan dan dukungan yang memadai. Pokok persoalan paling mendasar dalam pembangunan adalah soal pendekatan dan komunikasi yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Terkait dengan rencana pembangunan Bendungan Jragung itu hanya berpusat pada sosialisasi dalam forum formal dan cenderung kurang menghasilkan komunikasi yang efektif yang berakhir munculnya konflik yang berkepanjangan.

4. Dampak Ekonomi Pasca Dimulainya Pembangunan Bendungan Jragung

Pengaruh proses pembangunan Bendungan Jragung dalam aspek sosial dan ekonomi saling memberi dampak berkesinambungan pada masyarakat kawasan pembangunan akibat mata pencahariannya terganggu oleh aktivitas pembangunan. Satu dampak positif dari pembangunan bendungan tersebut menyerap tenaga kerja juga bagi kaum muda setempat. Sebagai contoh, dua pemuda Dusun Kedungglatik bekerja sebagai penjaga alat berat di malam hari. Namun, pekerjaan ini mempunyai risiko bahaya tinggi dan hanya memperoleh upah sebanyak Rp75.000 per malam. Meskipun dengan upah yang tergolong murah bagi mereka, pekerjaan tersebut tetap mereka ambil untuk membantu memenuhi kebutuhan, daripada harus menghadapi pengangguran berkepanjangan yang telah dialami sejak adanya pembangunan. Selain itu, dengan kehadiran orang-orang luar yang sering berkunjung ke dusun tersebut selama pembangunan bendungan turut memberi dampak positif terhadap warung-warung warga dengan bertambahnya jumlah konsumen.

Namun, dampak positif tersebut belum sebanding dengan berbagai dampak negatif yang signifikan. Dalam sebuah pembangunan bendungan yang membutuhkan lahan seperti pembangunan Bendungan Jragung, dampak negatif terhadap perekonomian dapat muncul karena dipicu oleh adanya ketidaksesuaian yang dirasakan masyarakat mengenai tetapan baik nilai ganti untung maupun kepastian relokasi. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya produktivitas masyarakat yang berujung pada stagnasi ekonomi. Selain itu, aktivitas Pembangunan di kawasan tersebut seringkali menimbulkan debu tebal yang menyebar hingga ke pemukiman warga, sehingga menambah gangguan terhadap kehidupan sehari-hari.

Lokasi Dusun Kedungglatik sejak lama memiliki jalan untuk menuju Kecamatan Pringapus sebagai pusat kecamatan. Jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan antara Dusun Kedungglatik dengan layanan dan fasilitas yang berada di kecamatan. Namun, jalan yang sebelumnya sangat terjal baru mendapat perhatian pembangunan setelah dimulainya proyek strategis nasional ini. Di pusat Kecamatan Pringapus sendiri terdapat berbagai pabrik, mulai dari pabrik tekstil hingga pabrik pengolahan limbah batok kelapa yang menjadi kesempatan bagi tenaga kerja usia produktif di Dusun Kedungglatik untuk beralih ke sektor industri pasca semakin tidak ada lahan pertanian. Namun, peluang tersebut tidak bagi warga yang telah memasuki usia tidak produktif atau lanjut usia. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pengganti pekerjaan akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi area pembangunan bendungan. Seperti kutipan wawancara berikut:

Dampak terhadap mata pencaharian yang paling parah dari pembangunan bendungan ini. Karena mayoritas warga bertani, menanam jagung. Kemudian selama satu tahun pembangunan bendung tersebut hanya tinggal sedikit yang masih bisa bertani.

Sedikit itu pun mereka yang nekat karena jika tidak menanam tidak makan, yang diandalkan hanya menanam. Kalau yang laku kerja para pemuda lari ke pabrik bisa buat nyambung ekonomi, Nduk. Namun, untuk usia bapak ini tidak laku di pabrik dan tidak bisa bertani dikarenakan pembangunan ini. (Sumber wawancara: Pak Taswanto)

Hilangnya mata pencaharian sebagai petani akibat pembangunan bendungan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut semakin meningkatkan kerentanan perekonomian, sehingga memaksa untuk bergantung pada anggota keluarga yang lebih muda sebagai tulang punggung keluarga, menggantikan peran orangtua yang tidak dapat lagi bertani. Perubahan fungsi lahan juga tidak hanya berimbas pada petani pemilik lahan, tetapu juga menimbulkan dampak lanjutan terhadap hilangnya lahan garapan buruh tani yang bergantung pada lahan tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Tentu juga hal tersebut dapat meningkatkan angka kemiskinan maka tidak sejalan dengan tujuan pembangunan dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Seperti yang diungkapkan Todaro dalam (Fadli et al., 2019), seharusnya pembangunan meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Dampak sosial dan ekonomi yang bahkan terjadi sejak proses pembangunan dimulai menunjukkan kurangnya perencanaan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga Dusun Kedungglatik, sehingga memperkeruh kerentanan mereka dan menciptakan ketidakpastian berkepanjangan.

1. KESIMPULAN

Perubahan yang terjadi selama proses pembangunan Bendungan Jragung membawa dampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Hilangnya mata pencaharian akibat berkurangnya lahan pertanian dan reklamasi Sungai Jragung sebagai sumber utama pengairan lahan pertanian, menjadi pukulan besar bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat, mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Implikasi dari perubahan tersebut meluas pada aspek sosial, dimana masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi baru yang tidak menguntungkan. Ketergantungan pada sektor pertanian yang sebelumnya menjadi tumpuan utama kini harus digantikan dengan alternatif yang belum tentu sesuai dengan kemampuan atau preferensi masyarakat setempat. Selain itu, perubahan ini menimbulkan gangguan yang mempengaruhi kondisi masyarakat yang terdampak, terutama ketika kebijakan pengadaan tanah dan pengadaan tanah tidak dikelola secara adil dan transparan.

Di satu sisi, Proyek Bendungan Jragung dirancang untuk memberikan manfaat besar bagi wilayah yang lebih luas, seperti mendukung kebutuhan irigasi dan pasokan air baku. Namun, disisi lain, dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pembangunan menjadi pisau bermata dua: membawa kemajuan sekaligus menimbulkan kerugian yang tidak bisa diabaikan.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan bendungan. Proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat terdampak serta menyediakan solusi alternatif yang memungkinkan mereka mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Kompensasi yang diberikan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat sebagai modal pertama agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Pada akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap tahapannya. Hanya dengan demikian, pembangunan benar-benar dapat menciptakan kesejahteraan yang merata tanpa meninggalkan kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi terpinggirkan. Bendungan Jragung mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dijalankan dengan

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial.

2. REFERENSI

Andri, K. B. (2016). Sejarah Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Akibat Pembangunan Waduk di Banjarnegara, Jawa Tengah. *Agriekonomika*, *5*(1), 1. https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v5i1.1021

Dye, B. (2016). The return of 'high modernism'? Exploring the changing development paradigm through a Rwandan case study of dam construction. *Journal of Eastern African Studies*, *10*(2), 303–324. https://doi.org/10.1080/17531055.2016.1181411

Fadli, A., & Alexander, Hilda. B. (2022). 61 Bendungan Dianggap Dapat Meningkatkan Potensi Irigasi Premium 1,2 Juta Hektar. *Kompas.Com*. https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/12/090132421/61-bendungan-dianggap-dapat-meningkatkan-potensi-irigasi-premium-12

Fadli, R., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, *6*(3), 552. https://doi.org/10.25157/jimag.v6i3.2517

Jemadu, A. (2003). Pembangunan dan modernisasi: implikasinya terhadap tatanan ekologi dan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(2). *https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1527*

Larasati, C., Abadi, A. W., Prakoso, G., S, Novanna. D., F, Venny. V., M, Wisha. P., Widyaningrum, W., & Hadi, M. P. (2021). Analisis Ketersediaan Air Permukaan dan Proyeksi Kebutuhan Air DAS Bodri Tahun 2040. *Majalah Geografi Indonesia*, *35*(1), 84–94. https://doi.org/10.22146/mgi.6301

Muliawan, J. W. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in The Land Acquisition / How to Easily Understand Land Procurement for Development Using 3 in 1 in The Land Acquistion Concept. *Jurnal Hukum Peratun*, *1*(2), 163–182. https://doi.org/10.25216/peratun.122018.163-182

Mulyono, J. (2017). Konsepsi Keamanan Bendungan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan. *Jurnal Infrakstrutur*, *3*(01), 62–69. https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/superman/post/20181128151313__F__KMS_JURNAL_20180726113220.pdf

Prayogo, R. D., Sriningsih, S., & Singandaru, A. B. (2024). Dampak Pembangunan Bendungan Meninting Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(4), 331–343. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2623

Ramadhan, A. F., Hafiz, A., Nabila, A. N., Ronggur, A., & Dewinta, C. (2024). Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 331–351. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3825

Rath, N. (2019). *Sociology of Development*. https://ddceutkal.ac.in/Syllabus/MA_SOCIOLOGY/Paper_19.pdf

Salinas, C. E. T., Oliveira, V. P. V. de, Brito, L., Ferreira, A. V., & de Araújo, J. C. (2019). Social impacts of a large-dam construction: the case of Castanhão, Brazil. *Water International*, *44*(8), 871–885. https://doi.org/10.1080/02508060.2019.1677303

Sitepu, B. C., Iftitah, E. A., Pribadi, A. I., & Dewi, S. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bendungan terhadap Perekonomian-Kesejahteraan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *3*(2), 170–185. https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.419